# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Ekonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia dengan luas wilayah 1,905 juta km² yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk 281,6 juta jiwa (BPS, 2024) membutuhkan kualitas layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemekaran wilayah di Indonesia telah berlangsung sejak periode kemerdekaan dan terakhir adalah pada tahun 2022 dengan total provinsi adalah sebanyak 38 dan 514 kabupaten di Indonesia (kemendagri, 2024).

Secara ekonomi, pengaruh pemekaran daerah terhadap kinerja makroekonomi dapat dijelaskan melalui, beberapa teori diantaranya adalah teori pertumbuhan ekonomi (Solow R. M., 1956) dan Swan, T. W. (1956), teori desentralisasi fiskal (Oates, W. E, 1972), Rodríguez-Pose, A., & Krøijer, A. (2009), dan teori ekonomi regional (Christaller, W. (1933), dan Krugman, P. (1991). Teori yang ada di atas menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan negatif dari pemekaran wilayah terjadap kesejahteraan masyarakat. Secara empiris, terlihat berbagai penelitian menunjukkan bahwa, pemekaran wilayah di negara berkembang memiliki dua dampak utama terhadap kesejahteraan masyarakat. dampak positif antara lain adalah meningkatkan akses infrastruktur dan investasi di daerah baru, mendorong pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja bagi masyarakat setempat, meningkatkan integrasi ekonomi regional, terutama melalui perdagangan internasional dan konektivitas pasar. Sedangkan dampak negatifnya meliputi meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi, ketergantungan terhadap bantuan luar, serta kerusakan lingkungan akibat urbanisasi yang tidak terkendali.

Beberapa studi lainnya juga menjelaskan bahwa kebijakan pemekaran wilayah memiliki keterkaitan dengan ekonomi hijau dan pembangunan berkeberlanjutan. Hal ini secara jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya, Elder, S Hopkinson, X Zhou, Y Arino, K Matsushita (2024) menjelaskan dalam studinya bahwa dampak pemekaran memiliki keterkaitan dengan kebijakan regional dan kesejahteraan di negara-negara ASEAN. Selanjutnya, studi lain juga menemukan bahwa ekspansi infrastruktur meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi menimbulkan tantangan dalam kesenjangan sosial dan lingkungan. hal ini dijelaskan oleh M Nadeem, F Xiaoyan, G Sadaf (2025) dalam penelitiannya tentang bagaimana proyek pemekaran ekonomi regional seperti CPEC mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Pakistan.

Beberapa studi empiris yang dilakukan di Indonesia berkaitan dengan pemekaran wilayah memperlihatkan bahwa pemekaran daerah memiliki dampak positif dalam mendekatkan pelayanan publik, namun masih menghadapi kendala dalam efektivitas pengelolaan anggaran daerah (ARN Mutaqin, 2024). dengan

membandingkan efektivitas kebijakan pemekaran di berbagai negara berkembang, penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran seringkali menghadapi tantangan dalam tata kelola keuangan daerah dan ketergantungan fiskal yang tinggi (Q. A'yuni & H. Prasetiyo, 2024). Selain itu, tantangan fiskal dan kelembagaan, salah satu aspek krusial yang kerap luput dari perhatian dalam kebijakan pemekaran adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). keberhasilan pemekaran wilayah tidak hanya bergantung pada pemenuhan aspek administratif dan fiskal. keberhasilan pemekaran wilayah juga sangat ditentukan oleh kesiapan SDM di daerah yang dimekarkan. Sumber daya manusia yang unggul menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan publik yang optimal.dalam konteks papua, tantangan besar yang masih dihadapi adalah rendahnya tingkat pendidikan, minimnya tenaga kerja terampil, serta keterbatasan kapasitas birokrasi daerah. (UNDP, 2023).

### 1.2 Rumusan Masalah

Sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Papua memiliki kawasan yang sangat luas jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Guna mendekatkan layanan publik kepada masyarakat yang ada di Papua. Pemekaran wilayah telah dilaksanakan sejak tahun 2003, dengan pemekaran di Provinsi Papua menjadi wilayah induk dan Provinsi Papua Barat. Pemekaran ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Namun yang baru diimplementasikan pada tahun 2003. setelah berbagai pertimbangan politik dan sosial lainnya baik di tingkat nasional maupun lokal.

Pemekaran wilayah untuk kabupeten dan kota juga yang terjadi di Papau antara lain adalah pada periode tahun 2008-2010, kabupaten baru yang dibentuk di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Tambrauw dan Maybrat. Selanjutnya pada tahun 2012, pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan juga terjadi di Provinsi Papua Barat. Memasuki tahun 2022, pemerintah Indonesia kembali melakukan pemekaran wilayah di Papua dengan membentuk tiga provinsi baru melalui Undang-Undang: 1) Provinsi Papua Selatan – Ibu kota di Merauke yang disahkan melalui UU No. 14 Tahun 2022 pada 25 Juli 2022, 2) Provinsi Papua Tengah – Ibu kota di Nabire yang disahkan dengan UU No. 15 Tahun 2022 pada 25 Juli 2022, 3) Provinsi Papua Pegunungan – Ibu kota di Wamena yang disahkan melalui UU No. 16 Tahun 2022 pada 25 Juli 2022.

Permasalahan ekonomi yang terjadi di Wilayah Papua telah berlangsung lama. Sampai saat ini, kesenjangan ekonomi dan kemiskinan penduduk terus berlangsung. Provinsi Papua dan Papua Barat mencatat sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. BPS (2022) mencatat bahwa tingkat kemiskinan di Papua mencapai sekitar 26,8%, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sekitar 9,5%. Ketimpangan ekonomi di Papua dan Papua Barat juga merupakan permasalahan utama dalam menghambat kesejahteraan masyarakat setempat. Ketimpangan ini terlihat dari aspek pendapatan, akses layanan dasar, hingga distribusi pembangunan antara masyarakat asli Papua dan pendatang. Indeks Gini di Provinsi Papua adalah 0,39 (BPS, 2023) dimana hal ini menunjuk menunjukkan ketimpangan yang tinggi di Indonesia. hal yang sama juga terjadi

di provinsi Papua Barat dengan Indeks Gini relatif lebih rendah dibandingkan Papua, namun tetap di atas rata-rata nasional yaitu 0,38 (BPS, 2023).

Permasalahan selanjutnya adalah Tingkat pengangguran di Papua dan Papua Barat menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. meskipun kedua provinsi ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas masih sangat besar. BPS (2023) mencatat bahwa Provinsi Papua memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di kisaran 3,7%, lebih rendah dari rata-rata nasional (5,4%), sedangkan di Provinsi Papua Barat memiliki TPT mencapai sekitar 6,3%, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Permasalahan tingkat inflasi di Papua memperlihatkan bahwa di Provinsi Papua dan Papua Barat selalu menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi geografis, aksesibilitas, dan ketergantungan pada distribusi barang dari luar wilayah. BPS (2023) mencatat bahwa Provinsi Papua memperlihatkan Inflasi pada tahun 2023 tercatat sekitar 4,2%, sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional (4,6%). Sedangkan Provinsi Papua Barat memiliki Inflasi lebih tinggi, mencapai sekitar 5,1%, melebihi rata-rata nasional.

Terakhir, permasalahan makroekonomi yang menjadi perhatian utama di Papua adalah kinerja pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja pertumbuhan ekonomi di Papua dan Papua Barat memperlihatkan dinamika yang cukup unik jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi tersebut sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan, khususnya di Papua, serta pertumbuhan ekonomi daerah ini juga pengaruh pemekaran wilayah dan kebijakan otonomi khusus. BPS (2023) mencatat bahwa Provinsi Papua memiliki kinerja pertumbuhan ekonomi 5,8% tahun 2023, mengalami meningkat dari periode sebelumnya. Sedangkan kinerja pertumbuhan ini dipengaruhi oleh sektor pertambangan. Kemudian di Provinsi Papua Barat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 4,5%, lebih rendah dari Papua tetapi masih bernilai positif.

### 1.3 Pertanyaan, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan kebijakan pemekaran di wilayah Papua, Penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu: ”Seberapa besar perbedaan dampak pemekaran wilayah terhadap kinerja makroekonomi di Wilayah di Papua?” meliputi: 1) Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, Tingkat Ketimpangan dan Indeks Pembangunan Manusia di Papua. Tujuan utama dari penelitian ini menganalisis dan menemukan besaran dampak pemekaran wilayah terhadap kinerja makroekonomi wilayah di Papua. Manfaat utama kajian ini adalah untuk memberikan gambaran secara deskriptif dan inferensial dampak Pemekaran wilayah terhadap kinerja makroekonomi di Wilayah Papua dan merekomendasikan berbagai kebijakan makroekonomi yang dibutuhkan untuk memperkuat perekonomian daerah pasca pemekaran wilayah di masa datang.

### 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis dampak pemekaran di Wilayah Papua yang dilaksanakan pada tahun 2023. Pemekaran ini meliputi Provinsi Papua sebagai wilayah induk dan Provinsi Papua Barat sebagai wilayah pemekaran. Ruang lingkup kinerja makroekonomi yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Sampai 2025, di Wilayah Papua sudah memiliki 6 (enam) provinsi yang dimekarkan yaitu, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Berkenaan dengan keterbatasan data, maka sample analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam periode 2010-2022.

Sistematika penulisan penelitian ini meliputi:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Meliputi latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan ruang lingkup penelitian.

**BAB II : TINJAUAN LITERATUR**

Meliputi: Pemekaran Daerah dalam Teori Ekonomi Regional, Konsep dan Teori Ekonomi Regional, Pemekaran Wilayah dan Teori Ekonomi Regional, Pemekaran Wilayah dan Kesejateraan Masyarakat, Studi Empiris: meliputi, Pemekaran Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi, Pemekaran Wilayah dan Pengangguran, Pemekaran Wilayah dan Ketimpangan Ekonomi, Kerangka Kajian Ekonomi dan Rumusan Hipotesis, Kerangka Kajian, Rumusan Hipotesis,

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Meliputi populasi dan Sampel Penelitian, Data dan Sumber Data, Definisi Operasional Variabel, Strategi Estimasi Empiris

**BAB IV : GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

Meliputi Letak Geografis Wilayah Papua, Perkembangan Sosio – Ekonomi Wilayah Papua, Kepadatan Penduduk Wilayah Papua, Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Papua, Perkembangan Tingkat Pengangguran di Wilayah Papua, Perkembangan Kemiskinan Penduduk di Wilayah Papua, Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Wilayah Papua, Tahapan dan Periodesasi Pemekaran Wilayah di Papua, Perkembangan Pemekaran Wilayah Provinsi di Papua, Perkembangan Pemekaran Wilayah Kabupaten dan Kota di Papua.

**BAB V : TEMUAN DAN ANALISIS**

Meliputi Ringkasan Statistik masing-masing variabel penelitian, Pemekaran Wilayah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Papua, Pengaruh Pemekaran Wilayah terhadap Pengangguran di Papua, Pengaruh Pemekaran Wilayah terhadap Kemiskinan di Papua, Pengaruh Pemekaran Wilayah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Papua, Implikasi Kebijakan.

**BAB VI : PENUTUP**

Meliputi kesimpulan dan saran penelitian

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA